

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat/daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah pusat/ daerah.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara maupun Daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAI) yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tujuan dari sistem pengelolaan keuangan negara adalah untuk memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang ada di bawah Kementerian Negara/Lembaga.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Keuangan adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem akuntansi instansi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 24/PB/2006 tentang penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAI) menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang dimaksud adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan tersebut di atas, pemerintah pusat mengembangkan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) menghasilkan LKPP yang akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI sebelum diserahkan ke DPR. SiAP terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SiAP akan menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan SAI menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pusat dipengaruhi oleh implementasi SiAP dan SAI, karena pada dasarnya LKPP merupakan konsolidasi dari laporan keuangan Kementerian/Lembaga, untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pada tingkat Kementerian, Eselon I, Wilayah maupun Satuan Kerja maka diterapkan suatu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) baik yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), menganalisa prosedur Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan hal penting dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk keperluan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Salah satu implementasi Sistem Akuntansi Instansi yang berpengaruh secara signifikan terhadap relevansi informasi adalah faktor kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Lebih lanjut Wilkinson (2000: 35) menyatakan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sangat tergantung pada *resources inputs* berupa *manpower, material, facilities, funds* dan data. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi

oleh kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan sistem akuntansi instansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi syarat kualitatif sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan.

Salah satu unit instansi yang melakukan pelaporan dan penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sulawesi II merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo pada Tahun Anggaran 2011 memperoleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi Dana Rupiah Murni dan Dana Pinjaman Luar Negeri yang tersebar pada 3 (tiga) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), dalam hal menjalankan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak luput juga dari kendala. Kendala dimaksud berupa Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan di KPPN dihadapkan dengan beberapa kendala yang terjadi, diantaranya ketidaksesuaian waktu atau keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh satuan kerja, serta terjadi ketidakcocokkan data transaksi laporan keuangan yang diakuntansikan oleh KPPN yang pada prinsipnya berasal dari dokumen sumber yang sama. Kesalahan penginputan dokumen sumber tersebut disebabkan adanya kemampuan sumber daya manusia yang menjadi petugas SAI

kurang memperhatikan penginputan dokumen sumber yang didapat dari masing-masing UAKPA. Dampak yang ditimbulkan dari kesalahan pencatatan menyebabkan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sehingga tidak jarang Satker sering mendapat sanksi dari pihak KPPN berupa penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja. Selain itu pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo sering terjadi perubahan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang disampaikan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan atas penyampaian Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dari pihak KPPN Pusat, dengan adanya keterlambatan tersebut maka laporan Sistem Akuntansi Instansi yang sudah dipertanggungjawabkan pada saat Konsolidasi laporan keuangan pada tingkat UAPPA-E1 mengalami perubahan.

Berbagai penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi instansi telah dilakukan. Penelitian tersebut diantaranya penelitian Mardiaris (2009) yang berjudul Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi berpengaruh signifikan (sangat kuat) terhadap kualitas laporan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, sehingga hasil hipotesis menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmi (2009) yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara). Kesimpulan dari penelitiannya adalah pelaksanaan SAI pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kesalahan yang timbul dari pelaksanaan SAI biasanya dikarenakan oleh *Human Error* (Kesalahan manusia), yaitu kesalahan dalam perekaman data SPM dan SP2D.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Choirunisah (2008) yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang. Kesimpulan dari penelitiannya adalah kemampuan sumber daya manusia yang merupakan variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap relevansi informasi sebagai karakteristik kualitas informasi.

Penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiaris (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek penelitiannya yang berbeda. Subjek penelitian yang akan diteliti lebih difokuskan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo. Selain itu, dalam penelitian ini variabel independen (X) lebih difokuskan pada penerapan sistem akuntansi instansi itu sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena yang dijelaskan di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi

instansi (SAI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan apakah penerapan sistem akuntansi instansi (SAI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk menguji tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi instansi (SAI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, menambah ilmu di bidang akuntansi khususnya bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu penelitian ini diharapkan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya tentang masalah sistem akuntansi instansi yang merupakan bagian dari akuntansi pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi semua Satker di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo dalam hal penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam meningkatkan ketepatan waktu dan

keakuratan data pelaporan keuangan guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas.